



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 4397-4402

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat Negeri Acoon, Kecamatan Nusalaut

Margret Inggrit Solissa

Universitas Satya Wiayata Mandala Nabire

Fakultas Perikanan Dan Kelautan Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan

Email: Inggritsolissa@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) yang merupakan proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan sendiri telah menjadi populer pada saat ini. Tata cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Keinginan masyarakat yang saling bertentangan atau berkompetisi merupakan salah satu alamiah masyarakat Pulau Nusalaut adalah sebuah Pulau kecil di antara gugusan Pulau – Pulau Wilayah Maluku sebagian besar penduduk Pulau Nusalaut adalah nelayan hal ini dimungkinkan karena letak Pulau Nusalaut berada di tengah laut yang luas yakni laut Banda. Penelitian ini dilaksanakan di pada bulan Februari - Maret 2024 di Negeri Acoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Pengumpulan data Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan, wawancara, kuisioner, Focus Grup Discussion (FGD). Penelitian ini untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai dilakukan dengan cara Focus Grup Discussion (FGD) dan wawancara langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dirancang dan disiapkan sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 responden. Analisis AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Merumuskan prioritas strategi pengelolaan sumber daya perikanan di Kecamatan Nusalaut menjadikan alternatif 4 (peningkatan sosial yang mendukung untuk pengelolaan sumber daya perikanan) dengan bobot nilai 22,3%, alternatif 7 (peningkatan sumber daya manusia) dengan bobot nilai 14,4%, alternatif 5 (peningkatan kerja sama yang baik antara pihak pihak terkait) dengan bobot nilai 13,7% sebagai alternatif yang harus diprioritaskan. Hasil analisis memiliki nilai konsistensi sebesar 0.06,

Kata kunci : Pengelolaan, Sumber Daya, Perikanan, Masyarakat, Nusalaut

PENDAHULUAN

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) yang merupakan proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan sendiri telah menjadi populer pada saat ini. Pengelolaan berbasis masyarakat telah ditetapkan dalam Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pada pasal 67 disebutkan bahwa Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan dan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, pada pasal 36 ayat (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil dan pasal 38: pengawasan masyarakat oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang serta KEP 58/MEN/2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Keinginan masyarakat yang saling bertentangan atau berkompetisi merupakan salah satu alamiah masyarakat. Namun, sifat ini juga merupakan alasan perlunya dikembangkan mekanisme pengelolaan sumberdaya perikanan yang dapat mengatasi konflik. Mekanisme tersebut adalah dengan membiarkan masyarakat sendiri menentukan cara-cara pengelolaan sumberdaya perikanan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang juga ditetapkan mereka sendiri. Terkait dengan hal ini Pulau Nusalaut adalah sebuah Pulau kecil di antara gugusan Pulau – Pulau Wilayah Maluku sebagian besar penduduk Pulau Nusalaut adalah nelayan hal ini dimungkinkan karena letak Pulau Nusalaut berada di tengah laut yang luas yakni laut Banda. Jumlah nelayan sebanyak 1.605 orang dari jumlah penduduk seluruhnya. ini memiliki potensi besar yang belum tereksplorasi secara maksimal, sementara itu banyak juga terdapat persoalan pengelolaan sumber daya perikanan Kerja sama Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Mengatasi berbagai permasalahan dan isu – isu yang muncul dalam pengelolaan

sumberdaya pesisir dan laut ini, di butuhkan suatu model pengelolaan yang kolanoratif yang memadukan antara unsure masyarakat, kelompok nelayan, dan pemerintah yang di kenal dengan Co- Management yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut

Pengelolaan atas sumber daya alam di Indonesia secara konstitusional berpedoman ketentuan Pasal 33 ayat (3) dengan tetap memperhatikan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” sebagai bentuk pemenuhan atas hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dilaksanakan secara seimbang tetap memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang Dasar 1945 dewasa ini telah mempertegas perannya, selain merupakan konstitusi politik juga merupakan konstitusi ekonomi. Melalui gagasan demokrasi politik dan ekonomi, maka seluruh sumberdaya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat yang dalam hal-hal tertentu pengurusannya diwakilkan kepada Negara.

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, Daerah mulai memperhatikan potensi yang dimilikinya dan yang secara ekonomis dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia yang secara geografis memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyadari betapa pentingnya pengelolaan kawasan tersebut untuk berbagai kegiatan baik yang bersifat ekonomis maupun konservasi dengan seimbang dan tepat. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memang merupakan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri namun rentan terhadap terjadinya konflik kepentingan, ekonomi dan sosial serta berbagai persoalan lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak didasarkan pada prinsip ekologis yang merupakan dasar pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan.

Konflik kewenangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat muncul ketika terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam dalam yurisdiksi wilayah pemerintah lokal dalam kerangka desentralisasi kewenangan. Pada sumber daya alam yang sifatnya tidak lintas batas, hal tersebut barangkali tidak akan menimbulkan masalah yang terlalu besar mengingat yurisdiksinya relatif jelas. Namun pada sumber daya yang sifatnya lintas wilayah seperti sumber daya perikanan dan kelautan, hal ini memerlukan perhatian yang cermat mengingat kemungkinan timbulnya konflik kewenangan sangat besar³. Seperti telah diketahui bahwa sumber daya kelautan bersifat common property (milik bersama) dengan akses yang bersifat quasi open access.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah laut internasional⁵. Masyarakat tradisional ini adalah anggota masyarakat yang bertempat tinggal tidak jauh dari pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, petani (termasuk petani budi daya ikan dan rumput laut), pedagang dan profesi lainnya. Sebagai sebuah komunitas, secara umum kehidupan masyarakat yang tinggal di kepulauan bukan saja relatif terisolasi, tetapi secara tradisional juga tertinggal dibandingkan daerah sekitarnya, mobilitas vertikal masyarakat berjalan lambat, bersifat tradisional dan pilihan hidup yang tersedia umumnya sangat terbatas. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan atau terlebih yang tinggal di kota-kota besar yang telah memiliki prasarana publik yang lengkap dan memiliki akses yang sangat tinggi terhadap informasi dan pasar.

METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Februari - Maret 2024, di Pulau Nusalaut Negeri Akoon, Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah.

Prosedur Pelaksanaan dan Analisis Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan, wawancara, kuisisioner, *Focus Grup Discussion* (FGD). Penelitian ini untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai dilakukan dengan cara *Focus Grup Discussion* (FGD) dan wawancara langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dirancang dan disiapkan sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 responden Analisis data yang digunakan dua analisis yakni : (1) Analisis Deskriptif Kualitatif; analisis deskriptif dilakukan untuk kondisi eksisting, potensi sumberdaya, sumberdaya manusia. Analisis deskriptif bertujuan memberikan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian Analisis AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Geografis .

Kecamatan Nusalaut terletak di Kepulauan Lease yang dihuni oleh 7 Negeri, yaitu Negeri Titawai, Abubu, Akoon, Ameth, Nalahia, Sila, Leinitu yang berlokasi di wilayah pesisir. Secara geografis, Kecamatan Nusalaut terletak pada Posisi 3° 30' 3 5'' Lintang Selatan dan 127° 50' 128,10'' Bujur Timur.

2. Letak Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah yang terdiri sebagian besar pulau-pulau kecil, sehingga luas perairan lautnya lebih besar daripada luas daratannya. Secara geografis batas-batas Kecamatan Nusalaut sebagai berikut : Sebelah Utara Kecamatan Saparua, Sebelah Selatan Laut Banda, Sebelah Timur Laut Banda, Sebelah Barat Laut Banda

3. Musim Panen.

Panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman (bercocok tanam), tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran (Mutiarawati, 2009). Dari hasil wawancara di lokasi penelitian yaitu Negeri Akoon, menunjukkan bahwa musim panen untuk sumber daya perikanan bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi, dimana musim kemarau hasil perikanan sangat menunjang kehidupan masyarakat yang ada di keempat Negeri ini karena dengan musim kemarau itu maka aktifitas atau hasil tangkapan yang di dapat mendukung perekonomian masyarakat dari keempat Negeri tersebut, untuk musim penghujan musim panen untuk sumber daya perikanan mengalami penurunan disebabkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk masyarakat khususnya nelayan yang ada di keempat Negeri ini untuk melaut hal ini juga yang mempengaruhi perekonomian dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari .

4. Mata Pencarian

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Nusalaut adalah nelayan. Sedangkan masyarakat yang bukan usia kerja memiliki jumlah yang paling besar yakni 1618 orang dari 5513 orang atau sebesar 29,35% dari jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk yang bukan usia kerja ini disebabkan karena usia kerja hanya berada pada usia 16 sampai dengan 65 tahun sedangkan yang lainnya merupakan usia yang belum produktif dan tidak produktif. Usia belum produktif adalah usia dibawah 5 tahun dan usia sekolah, sedangkan usia tidak produktif adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Jumlah nelayan sebanyak 1605 orang dari jumlah penduduk seluruhnya, atau sebesar 29,11% dari jumlah penduduk yang ada, sedangkan ibu rumah tangga menempati urutan ketiga dengan jumlah 1293 orang atau sebesar 23,45%, kemudian petani berjumlah 597 orang atau sebesar 10,83%. Sisanya sebanyak 7,26% penduduk terdiri dari PNS, tukang, pedagang dan pensiunan serta TNI/POLRI.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Sarana Prasarana

1. Kondisi Sosial

Karakteristik masyarakat di Negeri Akoon, secara etnis, agama, sosial budaya tergolong homogen. Dalam menjalani kehidupan masyarakat di keempat Negeri ini tetap memegang teguh norma, adat, agama dan etika sosial yang berlaku. Bahasa yang digunakan masyarakat keempat Negeri ini adalah bahasa Indonesia. Keadaan nilai-nilai budaya masyarakat setempat masih dipertahankan dengan baik, dimana penghargaan warga masyarakat terhadap orang tua, guru, tokoh masyarakat, tetangga dan pemerintah setempat masih cukup tinggi. Budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat keempat Negeri yakni tradisi gotong royong dan tradisi ini masih berlaku dan dijaga secara turun temurun.

2. Kondisi Ekonomi.

1. Kesempatan Kerja dan Berusaha

Negeri Akoon di Pulau Nusalaut yang berdekatan dengan pesisir sehingga mayoritas masyarakat dari keempat Negeri ini bekerja sebagai nelayan dan juga petani di keempat Negeri ini pada umumnya mempunyai pekerjaan yang ganda karena mereka hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya saja kalau lebih hasil yang mereka dapatkan barulah di jual ke tetangga atau ke Negeri tetangga. Nelayan dan petani yang ada di keempat Negeri ini bekerja sesuai musim dan juga tergantung waktu dari para petani dan nelayan. Waktu pagi, masyarakat pergi ke lahan pertanian masing – masing untuk melihat hasil yang mereka tanam, sehabis dari lahan pertanian masyarakat pergi melaut untuk mencari ikan dan hasil laut.

2. Tingkat Pendapatan Penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara di Negeri Akoon, sebagian besar masyarakat memiliki penghasilan rata-rata antara Rp 250.000,00 – Rp 500.000,00 per bulannya, tergantung musim dan hasil panen yang diperoleh dari sektor pertanian maupun perikanan.

3. Sarana Prasarana

1. Pendidikan

Prasarana pendidikan di Kecamatan Nusalaut secara umum dapat dikatakan cukup setiap Negeri minimal 1 (satu) bangunan sekolah dengan kondisi yang sangat baik bangunan sekolah (termasuk paud) seluruh sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah, dimana penyebarannya untuk SD meliputi seluruh Negeri sebanyak 10 (sepuluh) bangunan, untuk gedung sekolah menengah pertama/ sederajat terdapat 4 (empat) gedung yakni gedung SMP Negeri 1 Nusalaut yang terletak di Negeri Titawaai dan untuk tingkat SMA terdapat Di Negeri Ameth dengan jumlah 2 bangunan. Di Negeri Titawai terdapat 2 (dua) sekolah dasar yang menggunakan 1 (satu) gedung sekolah dimana SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 menggunakan gedung yang sama secara bergantian pagi dan siang.

1. Kesehatan.

a. Jumlah Tenaga Kesehatan

Negeri Akoon untuk tenaga kebidanan sebanyak 2 orang dan 3 tenaga keperawatan.

b. Jumlah Fasilitas

Negeri Akoon terdapat 1 puskesmas pembantu yang membantu aktifitas kesehatan dari masyarakat sekitar.

Potensi Sumberdaya Pesisir

• Potensi Sumberdaya Pesisir di Lokasi Penelitian.

1. Negeri Akoon

a. Hutan Mangrove.

Hutan Mangrove sering juga disebut sebagai hutan bakau yang merupakan komunitas yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut. Secara ekologi hutan mangrove mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung ((N. Harahab 2009). Diketahui luasan mangrove Negeri Akoon sebesar 16,54 ha (data citra landsat 8) dijelaskan bahwa luasan hutan mangrove masih memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat setempat untuk proses pengembangan wilayah maupun ekonomi mereka untuk menuju tingkat kesejahteraan tetapi tidak melakukan tindakan pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat mereka sendiri.

b. Padang Lamun.

Ekosistem padang lamun merupakan salah satu ekosistem di pesisir yang memiliki produktifitas yang tinggi. Tingginya produktivitas lamun tidak terlepas dari perannya sebagai produktivitas primer di perairan ekosistem laut (Supriadi *et al.* 2012; Rangkuti *et al.* 2017). untuk luasan padang lamun di Negeri Akoon sebesar 8,94 ha (data citra landsat 8). Penurunan luasan padang lamun ini ditunjukkan dengan aktifitas masyarakat yang memanfaatkan lahan padang lamun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu aktifitas yaitu sering melakukan aktivitas penambatan perahu di area padang lamun tersebut yang berakibat kepada ekosistem padang lamun itu sendiri.

c. Terumbu Karang.

Ekosistem terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalam laut merupakan salah satu sumber daya alam yang bernilai tinggi. Terumbu karang sebagai ekosistem esensial di perairan laut mempunyai peran sangat penting bagi kelangsungan hidup biota – biota lainnya . (Anonim, 2011) dengan luasan terumbu karang yang di miliki Negeri Akoon sebesar 17,48 ha (data citra landsat 8) dengan luasan terumbu karang yang ada maka potensi perikanan merupakan salah satu aktifitas yang dominan oleh nelayan yang ada di Negeri Akoon yang bisa menunjang kehidupan perekonomian untuk kebutuhan sehari – hari

Bentuk – bentuk pemanfaatan pesisir dan laut di Negeri Akoon.

Ada beberapa pemanfaatan yang didapat di lokasi penelitian.

1. Bamei : adalah aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayah pesisir dari Negeri Akoon yang menjadi lokasi penelitian yang ada untuk memenuhi kebutuhan.
2. Penangkapan ikan : aktifitas penangkapan ikan yang di lakukan pada kawasan pesisir terjadi secara tradisioanal karena masyarakat Negeri Akoon, hanya menggunakan alat seadanya ada juga yang menangkap ikan dengan jaring dan memancing tetapi hanya untuk konsumsi di karena masyarakat atau nelayan setempat tidak mempunyai alat tangkap yang menunjang aktifitas penangkapan tersebut.
3. Penambangan pasir dan batu : pengambilan pasir dan batu yang bertujuan memenuhi kebutuhan bahan bangunan dimana intensitas pengambilan pasir dan batu dilakukan hampir tiap hari dimana mengumpulkan batu yang berukuran besar kemudian hari berikutnya dipecahkan dan di jual. Sampai sejauh ini aktifitas tersebut belum dilakukan dalam skala besar namun merupakan ancaman untuk tahun – tahun kedepan sehingga dalam pengelolaan harus diadakan pembatasan terhadap kegiatan ini agar tidak terjadi abrasi pantai yang kemudian mengancam ekosistem pesisir.
4. Pembuangan sampah : masalah sampah pada wilayah pesisir akan berdampak pada ekosistem pesisir, untuk hal pembuangan sampah masyarakat Negeri Akoon, menyadari pentingnya 3 ekosistem utama yaitu ekosistem hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang ada di wilayah mereka dengan demikian masyarakat setempat tidak membuang sampah rumah tangga di laut.

Peran Pemerintah Dalam Mengelola Sumberdaya Pesisir & Laut Negeri Acoon

Dalam tata kelola sumber daya alam sumber daya alam diperlakukan sebagai objek konsumtif dalam mencapai rasio pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal itulah yang kemudian memunculkan adanya perilaku eksplorasi dan eksploitatif yang berlebihan untuk dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan ekonomi dalam mengelola sumber daya alam. Dikatakan demikian, karena sumber daya alam ini diperlakukan layaknya mesin ekonomi yang senantiasa dipaksa untuk menghasilkan kemanfaatan manusia. Adanya penguatan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola sumber daya alam melalui kearifan lokalnya memang perlu (Suhartini, 2009).

Untuk peran Pemerintah Kecamatan Nusalaut khususnya Negeri Acoon, dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut dari hasil wawancara di temui bahwa tidak ada peraturan desa yang mengatur untuk hal mengelola sumberdaya pesisir dan laut tetapi dengan kesadaran sendiri dari masyarakat yang ada di Negeri Acoon akan sumberdaya pesisir dan laut yang mereka miliki untuk itu walaupun sering melakukan aktifitas di wilayah daerah pesisir tetapi selalu mengutamakan untuk lebih menjaga sumberdaya pesisir dan laut yang mereka miliki. yang hanya dibuat Pemerintah itu berupa larangan supaya tidak membuat sampah di wilayah pesisir atau langsung ke laut selanjutnya keempat Negeri ini juga mempunyai tradisi yang dimiliki yaitu: mencuci negeri atau kampung

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat .

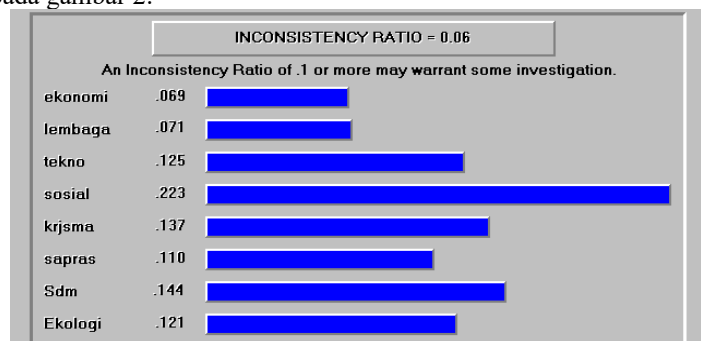
Berdasarkan uraian diatas maka, strategi pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat di Kecamatan Nusalaut merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, sampai pembuatan keputusan dalam pengelolaan sumber daya perikanan untuk memperoleh berbagai strategi pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat di Kecamatan Nusalaut sebagai langkah pengambilan keputusan maka dianalisis berbagai alternatif kebijakan yang diinginkan penentuan strategi pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat di Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah ditentukan melalui metode *Analytical Hierarchi Process*(AHP). Hasil analisis dapat disajikan pada tabel.

Tabel. 1. Peringkat Prioritas Strategi Pengelolaan Sumber Daya Peringkat Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Nusalaut Negeri Acoon

No	Strategi Alternatif	Bobot	Peringkat
1	Alternatif 1	6,9 %	8
2	Alternatif 2	7,1%	7
3	Alternatif 3	12,5%	4
4	Alternatif 4	22,3%	1
5	Alternatif 5	13,7%	3
6	Alternatif 6	11,0%	6
7	Alternatif 7	14,4%	2
8	Alternatif 8	12,1%	5

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis prioritas strategi pengelolaan sumber daya perikanan di Kecamatan Nusalaut menjadikan alternatif 4 (peningkatan sosial yang mendukung untuk pengelolaan sumber daya perikanan) dengan bobot nilai 22,3%, alternatif 7 (peningkatan sumber daya manusia) dengan bobot nilai 14,4%, alternatif 5 (peningkatan kerja sama yang baik antara pihak pihak terkait) dengan bobot nilai 13,7% sebagai alternatif yang harus diprioritaskan. Hasil analisis memiliki nilai konsistensi sebesar 0.06, hal ini menunjukkan bahwa nilai perbandingan antara responden bersifat konsisten. Penilaian perbandingan berpasangan seluruh kriteria yang dilakukan untuk mengetahui prioritas hubungan antar setiap kriteria pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat disajikan pada gambar 2.



Gambar . Hasil Analisis Prioritas Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Nusalaut.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya perikanan adalah serangkaian upaya terpadu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan perairan darat, serta memastikan ketersediaan ikan untuk generasi sekarang dan masa depan ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sumberdaya daya perikanan yang efektif sangat penting karena beberapa alasan. Pertama perikanan merupakan sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat terutama nelayan pengelolaan yang baik memastikan keberlanjutan komunitas pesisir, kedua perikanan adalah sumber protein penting bagi kebutuhan pangan manusia dengan mengelola sumberdaya perikanan kita dapat memastikan ketersediaan ikan untuk masa depan tetap ada, ketiga, pengelolaan perikanan yang baik juga berdampak pada kesehatan ekosistem laut dan perairan secara keseluruhan. Menjaga keseimbangan ekosistem ini penting untuk menjaga keberagaman hayati dan stabilitas lingkungan. Pembahasan mengenai tentang pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat diambil kesimpulan bahwa : Bentuk – bentuk pemanfaatan pesisir dan laut di Negeri Akoon antara lain Bameti, penangkapan ikan, Penambangan pasir dan batu, dan Pembuangan sampah. Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan yaitu sebagai fasilitator, motivator, inspirator, regulator dan solutor di Kecamatan Nusalaut Tiga strategi prioritas pengelolaan sumber daya perikanan masyarakat (1) Prioritas kehidupan sosial, (2) Prioritas sumber daya masyarakat, (3) kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat .

DAFTAR PUSTAKA

- Mutiawati, Tino. 2009. Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung.
- Nugroho, Iwan. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Harahab, N. 2009. Pengaruh Ekosistem Hutan Mangrove Terhadap Produksi Perikanan Tangkap (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Perikanan (J.Fish. Sci.)* XI (1) : 124-13
- Suhartini. 2009. Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA*. Yogyakarta: Fakultas MIPA UNY
- Suyatno, Bagong. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-Trans, 2013.
- Tuwo, Ambo Tuwo. *Pendekatan Ekologis dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam buku Membangun Sumberdaya Kelautan Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2013.
- Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
- Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Winarno, Budi. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: Center for Academic Publising Services (CAPS), 2013.